

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

1.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa di Slog Polri

Implementasi E-Katalog di Slog Polri pada prinsipnya telah memenuhi standar efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, khususnya dalam pengadaan barang umum dan rutin, yang tercermin dari tingkat pemanfaatan yang tinggi serta kemampuannya menyederhanakan prosedur pengadaan dan mempersempit ruang penyimpangan administratif. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan strategis dan spesifik institusi seperti Almatsus, jasa konsultasi, dan konstruksi berskala besar, sehingga implementasinya masih bersifat parsial dan belum responsif terhadap kompleksitas operasional Slog Polri. Akibatnya, sebagian proses pengadaan tetap membutuhkan diferensiasi sistem yang lebih kompleks dan berbasis diskresi.

Dari sisi sumber daya, Slog Polri memiliki ketersediaan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang relatif memadai secara kuantitatif, tetapi belum optimal secara kualitas dan pemerataan. Variasi kompetensi, terutama dalam adaptasi digital generasi senior, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta distribusi anggaran yang belum sepenuhnya proporsional terhadap kebutuhan strategis menyebabkan sumber daya tersebut belum mampu mendukung implementasi secara merata dan berkelanjutan. Kondisi ini membatasi efektivitas pengawasan berbasis sistem dan meningkatkan ketergantungan pada kontrol administratif pasca kegiatan, sehingga celah penyimpangan cenderung bergeser ke tahap perencanaan dan justifikasi teknis.

Karakteristik agen pelaksana di Slog Polri ditandai oleh kompetensi administratif, integritas, dan kepatuhan regulatif yang tinggi, yang diperkuat oleh struktur organisasi yang jelas, pakta integritas, serta audit berlapis. Namun, keterbatasan dukungan teknis, ketidakstabilan sistem, dan dinamika perubahan versi E-Katalog membatasi efektivitas peran tersebut, sehingga kapasitas administratif yang kuat belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan teknologis yang stabil. Dalam praktiknya, kondisi ini mendorong penggunaan mekanisme alternatif seperti E-Tender dan LPBJ sebagai respon diferensiasi sistem.

Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, serta respons adaptif terhadap kendala melalui mekanisme eskalasi sistematis dan penggunaan jalur alternatif. Namun, ketidaksesuaian spesifikasi katalog nasional dengan kebutuhan institusional membatasi efektivitas komitmen tersebut, sehingga integritas individu belum sepenuhnya mampu menutupi keterbatasan struktural kebijakan.

Komunikasi antarunit di Slog Polri berlangsung efektif secara formal melalui mekanisme verifikasi berlapis dan dialog struktural yang menjamin konsistensi pesan dan kepatuhan prosedural. Namun, keterbatasan komunikasi berbasis digital *realtime* menyebabkan koordinasi belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika teknis pengadaan, sehingga koreksi terhadap anomali proses sering terlambat dan baru terdeteksi pada tahap audit.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik secara umum mendukung implementasi melalui stabilitas regulatif, dukungan pimpinan, serta tekanan publik terhadap

transparansi. Namun, perubahan regulasi nasional, restrukturisasi kelembagaan LPSE, serta dilema antara tuntutan transparansi publik dan kebutuhan kerahasiaan keamanan negara menciptakan ketegangan struktural yang mempengaruhi fleksibilitas dan konsistensi implementasi. Ketegangan ini membatasi keterbukaan informasi tertentu dan memusatkan kontrol pada mekanisme internal, sehingga fungsi kontrol sosial eksternal belum sepenuhnya optimal.

4.1.2 Faktor pendorong dan penghambat implementasi E-Katalog di Slog Polri

Implementasi E-Katalog di Slog Polri didorong oleh kejelasan kerangka regulasi, struktur organisasi, integritas pelaksana, mekanisme audit internal dan eksternal yang kuat, serta budaya kepatuhan hukum yang tertanam dalam organisasi. Dukungan pimpinan, keterlibatan lembaga pengawas eksternal, serta legitimasi kebijakan secara formal memperkuat komitmen pelaksana untuk menjalankan sistem pengadaan elektronik secara konsisten dan bertanggung jawab.

Disisi lain, implementasi terhambat oleh keterbatasan adaptasi sistem terhadap kebutuhan spesifik Slog Polri, ketidakstabilan teknis E-Katalog V6, kesenjangan kompetensi digital pelaksana, ketimpangan infrastruktur wilayah, serta ketegangan antara tuntutan transparansi publik dan kebutuhan kerahasiaan keamanan negara membatasi keterbukaan informasi dan mempersempit ruang kontrol sosial, sehingga menciptakan dilema struktural dalam pengelolaan pengadaan yang sensitif.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa meskipun E-Katalog telah lama diterapkan, tantangan implementasi dan indikasi korupsi masih dapat muncul, karena digitalisasi tidak secara otomatis menutup seluruh celah tata kelola, melainkan

cenderung menggeser titik rawan ke tahap perencanaan kebutuhan, perumusan spesifikasi, pemilihan mekanisme pengadaan alternatif, dan justifikasi teknis. Dengan demikian, E-Katalog lebih berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif daripada sebagai alat pencegahan penyimpangan yang komprehensif.

4.2 Saran

1. Penyesuaian desain E-Katalog terhadap kebutuhan strategis Polri

Slog Polri disarankan untuk mengadvokasikan pada level kebijakan nasional melalui perluasan cakupan katalog nasional oleh LKPP dengan mengupayakan integrasi data sektoral dari Polri dan kementerian/lembaga terkait. Pengembangan sub-katalog sektoral atau katalog institusional terintegrasi perlu dilaksanakan agar kebutuhan operasional yang relatif kompleks tetap dapat diproses dalam sistem elektronik yang transparan dan akuntabel, tanpa harus bergantung pada mekanisme alternatif berbasis diskresi yang berpotensi memperbesar risiko tata Kelola.

2. Rekonstruksi LPSE Polri untuk memperjelas mandat dan kewenangan teknis

Slog Polri disarankan untuk melakukan rekonstruksi terhadap peran dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) internal untuk memperjelas mandat kelembagaan serta memperkuat kewenangan teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Rekonstruksi ini diperlukan agar LPSE Polri tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif penghubung sistem, tetapi juga sebagai pusat kompetensi teknis yang memiliki otoritas dalam standarisasi prosedur, asistensi teknis, pengendalian mutu proses, serta eskalasi masalah sistemik dalam implementasi E-Katalog.

3. Penguatan kompetensi digital sumber daya manusia pengadaan

Meskipun ketersediaan pelaksana di Slog Polri relatif memadai, kesenjangan kompetensi digital antar generasi dan antarwilayah membatasi efektivitas implementasi E-Katalog secara merata. Maka, diperlukan pemetaan kompetensi secara periodik, pelatihan berjenjang sesuai tingkat kompleksitas sistem, serta mekanisme pendampingan internal untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana memiliki kemampuan teknis yang setara dalam mengoperasikan sistem pengadaan elektronik, sehingga variasi praktik dapat ditekan dan ketergantungan pada solusi prosedural informal dapat dikurangi.

4. Penguatan stabilitas teknis dan dukungan sistem E-Katalog

Slog Polri disarankan untuk memperkuat koordinasi teknis yang berkelanjutan dengan pengelola E-Katalog dan LPSE pusat untuk mengantisipasi dinamika perubahan versi sistem, gangguan teknis, serta pembaruan fitur yang mempengaruhi proses pengadaan. Dukungan teknis yang stabil dan responsif menjadi prasyarat agar kapasitas administratif dan integritas pelaksana tidak terhambat oleh keterbatasan sistem, yang selama ini mendorong penggunaan diferensiasi sistem.

5. Pengelolaan ketegangan antara transparansi dan kerahasiaan keamanan

Slog Polri disarankan untuk menyusun protokol klasifikasi informasi pengadaan yang jelas guna membedakan antara informasi publik, terbatas, dan rahasia strategis, sehingga prinsip akuntabilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan keamanan nasional dan operasional institusi.